

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 64 TAHUN 2014

TANGGAL : 9 OKTOBER 2014

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula	SKPD Penanggungjawab
1. Meningkatnya pelaksanaan Srada & Bhakti.	1. Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	1. Jumlah konflik SARA	Jumlah konflik SARA pad tahun berkenaan	Dinas Kebudayaan / Kesbanglim
2. Meningkatnyapelestarian Adat dan Budaya Bali.	2. Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	2. Lestarnya Desa Adat dan Sekaa Taruna	Lestarnya Desa Adat dengan tatanannya Lestarnya Sekaa Teruna dengan tatanannya	Dinas Kebudayaan
	3. Terwujudnya kesatuan pemahaman terhadap pelaksanaan Sastra Agama Hindu yang dilandasi oleh Budaya Bali dan nilai-nilai ajaran Agama dan Sastra di masyarakat dalam melaksanakan kehidupan beragama.	3. Persentase sekolah yang memiliki prasarana pendidikan agama dan sastra	Jumlah sekolah Memiliki prasarana pendidikan agama -----x100% jumlah sekolah	Dinas Kebudayaan / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3. Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 tahun.	4. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.	4. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun	Jumlah siswa usia sekolah 7 s.d 18 tahun ----- x 100% Jumlah penduduk usia sekolah 7 s.d 18 tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		5. Angka Melek Huruf	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis ----- x100% jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	

<p>4. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.</p>	<p>5. Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di pasar kerja</p>	<p>6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</p>	<p>Jumlah tenaga kerja yang dilatih ----- x100% jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi</p>	<p>Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p>
	<p>6. Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi</p>	<p>7. Persentase lulusan pendidikan dasar yang diterima di jenjang yang lebih tinggi</p>	<p>Jumlah siswa yang lulus pada jenjang pendidikan dasar ----- x100% Jumlah siswa yang diterima pada jenjang pendidikan menengah</p>	<p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</p>
<p>5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Di Kabupaten Badung.</p>	<p>7. Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita</p>	<p>8. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup</p>	<p>Jumlah ibu meninggal karena hamil, bersalin dan nifas ----- x100.000 Jumlah kelahiran Hidup</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>
		<p>9. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup</p>	<p>Jumlah bayi (berumur &lt; 1 tahun meninggal ----- x 1.000 Jumlah kelahiran hidup</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>
		<p>10. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup</p>	<p>Jumlah balita (berumur &lt; 5 tahun meninggal ----- x 1.000 Jumlah kelahiran hidup</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>
	<p>8. Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung</p>	<p>11. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO</p>	<p>Jumlah Puskesmas yang berstandar ISO ----- x 100% Jumlah seluruh Puskesmas</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>
		<p>12. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi</p>	<p>Jumlah RS yang berstandar terakreditasi</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>

			----- x 100% Jumlah seluruh RS	
		13. Persentase perijinan sarana kesehatan	Jumlah sarana kesehatan berijin ----- x 100% Jumlah seluruh sarana kesehatan	Dinas Kesehatan
		14. Persentase perijinan praktek tenaga kesehatan	Jumlah Praktek tenaga kesehatan berijin -----x 100% Jumlah seluruh tenaga kesehatan yg praktek	Dinas Kesehatan
	9. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	15. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	Jumlah posyandu kriteria purnama dan mandiri -----x 100% Jumlah posyandu	Dinas Kesehatan
		16. Cakupan desa siaga aktif	Jumlah Desa Siaga yang Aktif ----- x 100% Jumlah Desa Siaga yang dibentuk	Dinas Kesehatan
		17. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga	Jumlah rumah tangga berPHBS ----- x 100% Jumlah rumah tangga yang dipantau	Dinas Kesehatan
6. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat guna dan peningkatan daya saing SDM.	10. Meningkatnya penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat di semua sektor lapangan usaha guna peningkatan daya saing usaha dan daya saing SDM	18. Jumlah penelitian IPTEK yang dipublikasikan	Jumlah penelitian IPTEK yang dipublikasikan	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemdes
7. Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang	11. Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	19. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	Jumlah KK yg diterbitkan -----x100% Jumlah kepala keluarga	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

tertib dan terpadu.			<p>Jumlah KTP yg diterbitkan -----x100% Jumlah Penduduk wajib KTP</p> <p>jumlah Kutipan Akta Kelahiran yg diterbitkan ----- x 100% jumlah Kelahiran yg terjadi</p> <p>Jumlah Kutipan Akta Kematian yg diterbitkan ----- x 100% Jumlah Kematian yg terjadi</p>	
	12. Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	20. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dbawah usia 20 tahun	<p>PUS yang Usia Istrinya &lt; 20 tahun ----- x 100% Pus yang usia istrinya 15-49 tahun</p>	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.	13. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	<p>21. Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar</p> <p>22. Presentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.</p>	<p>Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun ----- x 100% jumlah PMKS skala Kab/Kota dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial</p> <p>Jumlah penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun -----x 100% Jumlah penyandang</p>	<p>Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</p> <p>Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p>

			cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	
9. Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan.	14. Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	23. Jumlah UMKM dan koperasi	Jumlah UMKM dan koperasi pada tahun berkenaan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
10. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	15. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	24. Jumlah dan kualitas produksi, produktivitas dan pemasaran hasil komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan	Jumlah produktivitas bahan pangan utama (padi)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
	16. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	25. Jumlah populasi peternakan 26. Jumlah produksi perikanan dan kelautan	Jumlah populasi peternakan  Jumlah produksi kelautan dan perikanan	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
11. Terwujudnya supremasi hukum di semua aspek kehidupan dan kepastian hukum melalui tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perundangan yang tumpang tindih dengan aturan lain maupun di atasnya.	17. Meningkatnya peran pemerintahan daerah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	27. Cakupan regulasi yang disusun	Jumlah regulasi yang disusun dibagi jumlah target regulasi	Bagian Hukum dan Ham

12. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	18. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	28. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban pada tahun berkenaan	Satpol PP
	19. Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	29. Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani	Jumlah pelanggaran yang diselesaikan -----x 100 Jumlah pelanggaran	Satpol PP
13. Terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta profesional.	20. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.	30. SKPD dan UPTD Dinas dan Badan yang mempunyai papan struktur organisasi yang sesuai dengan kaidah kelembagaan.	Jumlah SKPD dan UPTD Dinas dan Badan yang mempunyai papan struktur organisasi yang sesuai dengan kaidah kelembagaan ----- x 100% Jumlah Keseluruhan SKPD	Bagian Ortal
		31. Indikator roadmap masuk		
		32. SKPD yang melaksanakan SPM	Jumlah SKPD yang melaksanakan SPM	Bagian Ortal
		33. SKPD yang memiliki SP	Jumlah SKPD yang memiliki SP	Bagian Ortal Bagian Ortal
		34. SKPD yang melaksanakan penilaian IKM / SKM	Jumlah SKPD yang melaksanakan penilaian IKM / SKM	
		35. SKPD yang memiliki SOP.	JumlahSKPD yang memiliki SOP.	Bagian Ortal
		36. SKPD yang dievaluasi dalam Pelayanan Publik.	Jumlah SKPD yang dievaluasi dalam Pelayanan Publik.	Bagian Ortal
		37. Jumlah pengunjung website Kab. Badung	Jumlah pengunjung website tahun N ditambah (jumlah pengunjung website tahun N dikali 10%)	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
38. Jumlah SKPD yang Online	Jumlah SKPD yang Online	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		

14. Terjaminnya terwujudnya <i>good government and clean government</i> .	21. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	39. Opini Pemeriksaan BPK  40. Peningkatan pendapatan asli daerah  41. Jumlah wajib pajak yang terhubung dengan sistem online	Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan  Jumlah pendapatan asli daerah  Jumlah wajib pajak yang terhubung dengan sistem online transaksi pajak daerah	Inspektorat  Dispenda/pasedahan Agung  Dispenda/Pasedahan Agung
	22. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel	42. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Hasil Penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Bagian Ortal
15. Meningkatnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.	23. Meningkatnya partisipasi stakeholders dalam perumusan kebijakan publik	43. Persentase kehadiran stakeholders dalam musrenbang	jumlah stakeholders yang hadir dalam musrenbang -----x100% Jumlah Stakeholders yang diundang dalam musrenbang	Bappeda & Litbang
16. Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antarwilayah.	24. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	44. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten  45. Penataan kawasan strategis kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang  46. Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Jumlah dokumen perencanaan pada kawasan strategis kabupaten  Jumlah kawasan strategis kabupaten yang telah dilakukan penataan  Kondisi mantap = jumlah panjang jalan berkondisi baik + sedang -----x 100% Jumlah total jumlah panjang jalan Kabupaten	Bappeda & Litbang  Dinas Cipta Karya  Dinas Bina Marga

		47. Jumlah ruas jalan yang telah diperkeras	Jumlah ruas jalan yang diperkeras	Dinas Bina Marga
		48. Jumlah panjang ruas jalan yang telah diperkeras	Jumlah panjang jalan yang diperkeras	Dinas Bina Marga
		49. Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Jumlah panjang jaringan irigasi yang berkondisi baik -----x100% jumlah panjang jaringan irigasi	Dinas BinaMarga
		50. Jumlah debit air yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah	jumlah luas sawah x 2 liter/detik /ha	Dinas Bina Marga
		51. Presentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Jumlah panjang dalam kondisi baik -----x100%	Dinas Bina Marga
		52. Jumlah ruas jalan yang terbeutyfikasi	Jumlah total panjangjalan	Dinas Bina Marga
		53. Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Akumulasi jumlah ruas jalan terbeutyfikasi	Dinas Bina Marga
		54. Luasan Sawah yang terlayani jaringan air irigasi	Jumlah panjang saluran irigasi terkondisi baik -----x100% Jumlah total panjang saluran irigasi	Dinas Bina Marga
		55. Jumlah mata air yang dikonservasi	Jumlah luas sawah terlayani jaringan irigasi	Dinas Bina Marga
		56. Prosentase luas kawasan bebas banjir	Jumlah penataan mata air	Dinas Bina Marga



			Luas wilayah kabupaten badung dikurangi luas kawasan banjir	
17. Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah.	25. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	57. Tersedianya bangunan publik yang dibangun sesuai dengan rencana tata ruang	Jumlah bangunan publik yang dibangun sesuai dengan rencana tata ruang	Dinas Cipta Karya
		58. kegiatan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang setiap tahun	Dinas Cipta Karya
		59. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	Perbandingan luas lahan terbangun yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung dengan luas total lahan yang boleh terbangun x 100%	Dinas Cipta Karya
		60. Prosentase sarana prasarama gedung pemerintah yang representatif	Jumlah bangunan pemerintah yang memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung -----x100% Jumlah total bangunagedungpemerintah yang ada	Dinas Cipta Karya
		61. Prosentase sarana prasarana bangunan umum yang representatif	Jumlah bangunan umum yang memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung -----x100% Jumlah total bangunagedung yang ada	Dinas Cipta Karya
		62. Prosentase jalan lingkungan pemukiman dengan kondisi baik	Panjang jalan lingkungan dengan kondisi baik -----x100% Panjang total jalan lingkungan yang tertata	Dinas Cipta Karya

	<p>Terwujudnya pengendalian perusahaan SDA dibidang ESDM.</p>	<p>63. Prosentase penyediaan jaringan air bersih dengan kondisi baik</p> <p>64. Persentase persediaan SR Limbah Komunal dengan kondisi baik</p> <p>65. Prosentase Usaha dibidang energi yang memenuhi ketentuan penyelenggaraan usaha</p> <p>66. Persentase pengusaha bidang sumber daya mineral yang memenuhi ketentuan penyelenggaraan usaha</p>	<p>Perbandingan jaringan air bersih terpasang dengan kondisi baik x 100%</p> <p>Perbandingan jumlah SR limbah yang terpasang dengan jumlah RT di Kabupaten Badung x 100%</p> <p>Perbandingan jumlah usaha bidang migas dan LED (Listrik Energi Baru dan terbarukan) yang memenuhi persyaratan usaha dengan jumlah pengusaha bidang migas dan LED yang ada x 100%</p> <p>Perbandingan jumlah pengusaha bidang mineral batuan dan air tanah yang memenuhi persyaratan usaha dengan jumlah pengusaha bidang mineral batuan dan air tanah yang ada x 100 %</p>	<p>Dinas Cipta Karya</p> <p>Dinas Cipta Karya</p> <p>Dinas Cipta Karya</p> <p>Dinas Cipta Karya</p>
	<p>26. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.</p>	<p>67. Jumlah daerah rawan kemacetan</p> <p>68. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)</p> <p>69. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light</p>	<p>Jumlah daerah rawan kemacetan</p> <p>Rata-rata V/C Ratio pada ruas jalan dibagi jumlah ruas jalan</p> <p>Jumlah persimpangan yang terpasang TL -----x100%</p>	<p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Perhubungan,</p>

		<p>70. Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan</p> <p>Persentase kendaraan umum yang laik jalan dibandingkan jumlah kendaraan umum yang ada</p>	<p>jumlah persimpangan yang akan terpasang TL</p> <p>Jumlah kendaraan laik jalan tahun N ditambah (jumlah kendaraan laik jalan tahun N dikali 10%)</p> <p>Jumlah kendaraan umum laik jalan tahun N dibagi jumlah kendaraan umum yang ada tahun N x 100 %</p>	<p>Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p>
18. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	27. Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	71. Terpenuhinya nilai baku mutu sumber daya alam (air, udara, tanah), untuk indikator dibagi menjadi air, udara, dan tanah)	<p>Jumlah obyek pemantauan sumber daya alam yg memenuhi baku mutu</p> <p>-----x100%</p> <p>obyek sumber daya alam yang ada</p>	Badan Lingkungan Hidup
19. Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.	28. Terwujudnya penegakan hukum yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.	72. Meningkatnya ketaatan hukum dlm pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	<p>Jumlah usaha / kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan</p> <p>-----x 100%</p> <p>jumlah usaha/kegiatan yang ada</p>	Badan Lingkungan Hidup

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 64 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 9 OKTOBER 2014  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

Tujuan	Indikator	Formula	Sasaran	Indikator	Formula	Penjelasan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatnya pelaksanaan Srada & Bhakti.	1. Peningkatan pelaksanaan srada  2. Peningkatan pelaksanaan bhakti	Jumlah pelaksanaan srada tahun sekarang – tahun lalu dibagi tahun lalu dikali 100%  Jumlah pelaksanaan bhakti tahun sekarang – tahun lalu dibagi tahun lalu dikali 100%	1. Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	1. Jumlah konflik SARA	Jumlah konflik SARA terjadi di Kabupaten Badung yang dihitung pada tahun berkenaan	Peningkatan pelaksanaan srada dan bhakti pada tujuan IKU tidak dihitung	Dinas Kebudayaan
2. Meningkatnya pelestarian Adat dan Budaya Bali.	3. Persentase desa adat yang memenuhi tantangan yang ditetapkan  4. Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan	Persentase desa adat yang memenuhi tatanan terhadap target akhir tahun RPJMD  Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan terhadap target akhir tahun RPJMD	2. Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	2. Persentase desa adat yang <i>memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)</i>  3. Persentase sekaa teruna yang <i>memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)</i>	Jumlah desa adat yang memenuhi tatanan yang lestari dibagi desa adat di Kab. Badung x 100%  Jumlah sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang lestari dibagi desa adat di Kab. Badung x 100%		Dinas Kebudayaan

<p>3. Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 tahun.</p>	<p>5. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun</p>	<p>Jumlah siswa usia SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK seluruhnya ----- x100% Jumlah penduduk usia sekolah 7 s.d 18 tahun</p>	<p>3. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.</p>	<p>4. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun</p> <p>5. Angka Melek Huruf</p>	<p>Jumlah siswa usia SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK seluruhnya ----- x100% Jumlah penduduk usia sekolah 7 s.d 18 tahun</p> <p>Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis ----- x100% jumlah penduduk usia 15 tahun keatas</p>	<p>Mengurangi kesenjangan antara jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah siswa usia sekolah</p> <p>Mengurangi penduduk yang buta huruf dan meningkatkan taraf hidup penduduk</p>	<p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</p>
<p>4. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.</p>	<p>6. Persentase lulusan pendidikan dasar yang diterima di jenjang SMA/MA/SMK</p>	<p>Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/MA/SMK ----- x100% Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya</p>	<p>4. Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi</p>	<p>6. Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah</p>	<p>Jumlah siswa yang lulus pada jenjang pendidikan dasar ----- x100% Jumlah siswa yang diterima pada jenjang pendidikan menengah</p>	<p>Meningkatkan pendidikan menengah universal</p> <p>Jumlah siswa yang dimaksud formula indikator sasaran adalah siswa yang lulus SMA</p>	<p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</p>

5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Di Kabupaten Badung.	7. Angka kesakitan	Jumlah penderita penyakit DBD ----- x1000 Jumlah penduduk	5. Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita	7. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah ibu meninggal karena hamil, bersalin dan nifas ----- x100.000 Jumlah kelahiran Hidup	Angka kematian merupakan salah satu indikator terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Pengendalian angka kematian merupakan indikator untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
	8. Angka kematian	Jumlah ibu meninggal karena hamil, bersalin dan nifas ----- x100.000 Jumlah kelahiran hidup  Jumlah bayi (berumur < 1 tahun meninggal ----- x 1.000 Jumlah kelahiran hidup  Jumlah balita (berumur < 5 tahun meninggal ----- x 1.000 Jumlah kelahiran hidup		8. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Jumlah bayi (berumur < 1 tahun meninggal ----- x 1.000 Jumlah kelahiran hidup		
	9. Persentase Balita Gizi Buruk	Jumlah balita gizi buruk ----- x 100 Jumlah seluruh balita	6. Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung	10. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO	Jumlah Puskesmas yang berstandar ISO ----- x 100% Jumlah seluruh Puskesmas	Terciptanya pelayanan yang baik disertai kualitas rumah sakit yang terakreditasi diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung	Dinas Kesehatan
				11. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi	Jumlah RS yang berstandar terakreditasi ----- x 100% Jumlah seluruh RS		

			7. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	12. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri  13. Cakupan desa siaga aktif  14. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga	Jumlah posyandu kriteria purnama dan mandiri -----x 100% Jumlah posyandu  Jumlah Desa Siaga yang Aktif ----- x 100% Jumlah Desa Siaga yang dibentuk  Jumlah rumah tangga berPHBS ----- x 100% Jumlah rumah tangga yang dipantau	Kemandirian posyandu, desa siaga aktif dan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan batasan-batasan yang dipakai untuk tercapainya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kab. Badung	Dinas Kesehatan
6. Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu.	10. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	Jumlah KK yg diterbitkan -----x100% Jumlah kepala keluarga  Jumlah KTP yg diterbitkan -----x100% Jumlah Penduduk wajib KTP  Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yg diterbitkan ----- x 100% jumlah Kelahiran yg terjadi  Jumlah Kutipan Akta Kematian yg diterbitkan ----- x 100% Jumlah Kematian yg terjadi	8. Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	15. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	Jumlah KK yg diterbitkan -----x100% Jumlah kepala keluarga  Jumlah KTP yg diterbitkan -----x100% Jumlah Penduduk wajib KTP  Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yg diterbitkan ----- x 100% jumlah Kelahiran yg terjadi  Jumlah Kutipan Akta Kematian yg diterbitkan ----- x 100% Jumlah Kematian yg terjadi	Layanan administrasi kependudukan yang dicakup adalah KK, KTP, Akte Kelahiran, Akta Kematian	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

			9. Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	16. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	PUS yang Usia Istrinya < 20 tahun ----- x 100% Pus yang usia istrinya 15-49 tahun	Memperkecil median usia kawin pertama wanita kurang dari 20 tahun dari 0.30 tahun 2010 menjadi 0.15 tahun 2015	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.	11. Persentase penurunan penyandang masalah sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun -----x 100% Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	10. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	17. Persentase penurunan penyandang masalah sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun -----x 100% Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Penanggulangan masalah PMKS di Kabupaten Badung untuk 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kab. Badung	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
8. Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan.	12. Jumlah pertumbuhan UKM di Kabupaten Badung	Jumlah UKM yang berdiri pada tahun ke N dibagi jumlah UKM yang ada pada tahun ke N di kali 100%	11. Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	18. Persentase koperasi sehat dan berkualitas	Jumlah UMKM dan koperasi sehat dibagi jumlah UMKM dan Koperasi yang ada dikali 100%	Koperasi yang sehat dan berkualitas merupakan koperasi yang memenuhi standarisasi sesuai dengan Permen Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.20/PERMEN.KUKM /XI/2008	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



	13. Persentase peningkatan nilai eksport UKM	Nilai ekspor UKM tahun sekarang – nilai ekspor UKM tahun sebelumnya -----x 100% Nilai ekspor UKM tahun sebelumnya		19. Persentase peningkatan nilai eksport UKM	Nilai ekspor UKM tahun sekarang – nilai ekspor UKM tahun sebelumnya -----x 100% Nilai ekspor UKM tahun sebelumnya	Nilai eksport yang dimaksud adalah nilai eksport hasil UKM yang ada di Kabupaten Badung	
9. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	14. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan	Selisih Total produk usaha pertanian, perkebunan tahun ke –n dan tahun n-1 dibagi total produk usaha pertanian, perkebunan pada pada tahun ke5 RPJM dikali 100%	12. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	20. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan	Total produk usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan pada tahun ke-n	Yang menjadi batasan pengukuran peningkatan produksi dan produtivitas pada tujuan dan sasaran adalah kuantitas dari produksi hasil Komoditinya	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
	15. Peningkatan produktivitas bahan pangan utama pangan	Selisih produktivitas pertanian per pada tahun ke n dengan tahun ke n-1 dibagi target produktivitas pada tahun ke 5 RPJMD		21. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)	Total produksi bahan pangan utama per panen di bagi luas lahan	Peningkatan Kuantitas pangan untuk menjamin ketersediaan pangan penduduk	
	16. Peningkatan populasi peternakan	Selisih Total populasi peternakan tahun ke –n dan tahun n-1 dibagi total populasi tahun ke n-1 dikali 100%	13. Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	22. Jumlah populasi peternakan	Jumlah seluruh populasi ternak tiap tahun yang dihitung pada saat pencacahan	Yang menjadi batasan pengukuran peningkatan produksi dan produtivitas pada tujuan dan sasaran adalah kuantitas dari produksi hasil Komoditinya	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
	17. Jumlah produksi perikanan dan kelautan	Jumlah produksi budidaya ikan dan hasil penangkapan ikan baik yang dihasilkan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan dalam jangka waktu tertentu		23. Jumlah produksi perikanan dan kelautan	Jumlah produksi budidaya ikan dan hasil penangkapan ikan baik yang dihasilkan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan dalam jangka waktu tertentu	Dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan yang bermuara untuk kesejahteraan	

<p>10. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat</p>	<p>18. Jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan</p>	<p>Jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan terhadap target akhir tahun RPJMD</p>	<p>14. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat</p>	<p>24. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban</p>	<p>Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban pada tahun berkenaan</p>	<p>Pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilaporkan dn dipantau pada tahun berkenaan</p>	<p>Satpol PP</p>
	<p>19. Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban</p>	<p>Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban terhadap target akhir RPJMD</p>	<p>15. Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban</p>	<p>25. Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani</p>	<p>Jumlah pelanggaran yang diselesaikan -----x 100 Jumlah pelanggaran</p>	<p>Penegakan Perda dan Peraturan Bupati yang dilakukan untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat dan badan hukum</p>	<p>Satpol PP</p>
<p>11. Terjaminnya terwujudnya <i>good government and clean government</i>.</p>	<p>20. Opini pemeriksaan BPK</p>	<p>Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan</p>	<p>16. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.</p>	<p>26. Opini Pemeriksaan BPK  27. Peningkatan pendapatan asli daerah</p>	<p>Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan  Jumlah pendapatan asli daerah</p>	<p>Opini BPK atas laporan keuangan merupakan salah satu perwujudan untuk menjadi <i>good government</i> dan <i>clean government</i>  Adanya peningkatan pendaptan asli daerah merupakan salah satu keberhasilan dari tata kelola keuangan daerah</p>	<p>Inspektorat  Dispenda / pasedahan Agung</p>

	21. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Hasil Penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	17. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel	28. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Hasil Penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan gambaran dan pencapaian sistem manajemen kinerja pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan norma, standar prosedur sehingga mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel menuju <i>good government</i> dan <i>clean government</i>	Bagian Ortal
12. Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah.	22. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan pada kawasan strategis kabupaten	18. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	29. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan pada kawasan strategis kabupaten	Terwujudnya tata ruang kawasan yang strategis	Bappeda & Litbang
	23. Prosentase luas kawasan bebas banjir	Luas wilayah kabupaten badung dikurangi luas kawasan banjir		30. Prosentase luas kawasan bebas banjir	Luas wilayah kabupaten badung dikurangi luas kawasan banjir	Kawasan yang yang bebas banjir dapat mewujudkan pembangunan badung yang sesuai dengan program pemanfaatan ruang	Dinas Bina Marga
13. Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah.	24. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	Perbandingan luas lahan terbangun yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung dengan luas total lahan yang boleh terbangun x 100%	19. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	31. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	Perbandingan luas lahan terbangun yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung dengan luas total lahan yang boleh terbangun x 100%	Terlaksananya pembangunan sesuai dengan tata ruang	Dinas Cipta Karya

	25. Prosentase kelancaran transportasi	Jumlah ruas jalan bebas macet dibagi jumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Badung x 100%		32. Prosentase sarana prasarana gedung pemerintah yang representatif	Jumlah bangunan pemerintah yang memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung -----x 100 Jumlah total bangunan gedung pemerintah yang ada		
			20. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.	33. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)	Rata-rata V/C Ratio pada ruas jalan dibagi jumlah ruas jalan	Pengukuran v/c rasio pada ruas jalan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kemacetan ruas jalan tersebut	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				34. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light	Jumlah persimpangan yang terpasang TL -----x100% jumlah persimpangan yang akan terpasang TL		
14. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	26. Persentase sumberdaya air yang memenuhi standar baku mutu	Jumlah sumber daya air yang memenuhi baku mutu -----x100% Banyaknya sumber daya air yang dipantau	21. Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	35. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air	Jumlah obyek pemantauan sumber daya alam yg memenuhi baku mutu -----x100% Obyek sumber daya air yang dipantau	Sumber daya air yang dimaksud adalah sumber daya air laut dan sungai Jumlah sumberdaya air yang dipantau sebanyak 20 titik pantauan setiap tahunnya	Badan Lingkungan Hidup
				36. Persentase sumberdaya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu	Jumlah titik pantau udara yg memenuhi baku mutu -----x100% Jumlah titik pantau udara	Terpantaunya kualitas air dengan parameter BOD = 6 mg/L COD = 50 mg/L Terpantaunya kualitas udara dengan parameter parameter NO2 = 400 mg/L SO2 = 900 mg/L Sesuai Perbub No. 8 Tahun 2007	

	27. Persentase perusahaan yang menggunakan pengolahan limbah	Jumlah perusahaan yang dibina yang telah menggunakan pengolahan limbah -----x100% Banyaknya perusahaan yang dibina		37. Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah	Jumlah perusahaan yang dibina yang telah menggunakan pengolahan limbah -----x100% Banyaknya perusahaan yang dibina		
--	--	--	--	--	--	--	--

BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG